

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SKRIPSI

Oleh
ASMAWARNI
NIM 105730537315



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENEDAN KEPULAUAN**

Oleh
ASMAWARNI
NIM 105730537315

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk orang tercinta terutama kedua orang tuaku dan saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama saya menuntut ilmu hingga sampai sekarang, sayamengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa selalu memberikan saya arahan dan masukan serta saran sehingga memudahkan saya dalam penyusunan skripsi dan seluruh dosen yang dengan sabarnya tidak pernah berhenti memberikan ilmunya dan tidak lupa juga sahabat seperjuangan kelas Ak 15 F yang selalu memberikan dorongan dan selalu kompak dalam segala hal.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya sesudah Kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyrah 6-8)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan"

Nama Mahasiswa : Asmawarni
No. Stambuk/NIM : 105730537315
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
NBM: 651073


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA., CSP
NIDN: 0915058801

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM : 407-3428





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

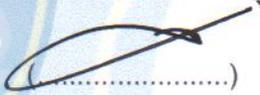
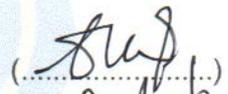
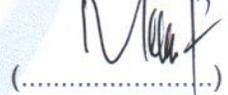
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **ASMAWARNI, NIM 105730537315**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1441 H
14 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji
 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak.CA 
 2. Amir, SE., M.Si., Ak., CA 
 3. Mira, SE., M.Ak., Ak 
 4. Ismail Rasulong, SE., MM 



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmawarni
No. Stambuk/NIM : 105730537315
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Muharram 1441 H
14 September 2019 M

Yang membuat pernyataan,



Asmawarni

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Ismail Rasullong.,SE.,MM
NBM : 903078

Dr. Ismail Badollahi.,SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti deiberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada tara ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Kabupaten Pagkajene dan Kepulauan”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang penulis bapak Anwar dan Ibu Nurbaeti yang senantiasa member harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menintut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadahdan cahaya penerangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. AbdRahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang tlah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Sripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fi Sabilil Haq, FastabiquKhairat, Wassalamu'alaikumWr.Wb

Makassar Agustus 2019

Asmawarni



ABSTRAK

ASMAWARNI, Tahun 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Rahman Rahim dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis Penelitian dalam Penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan dan Rasio Keuangan.*



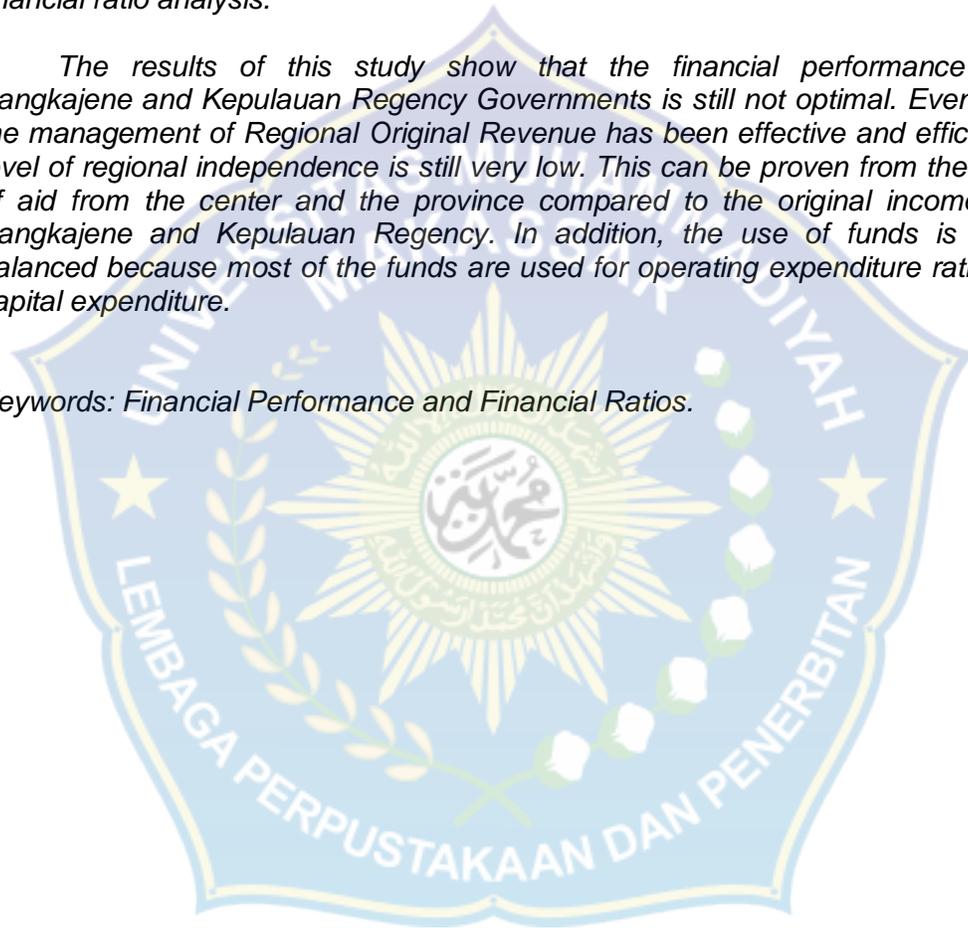
ABSTRACT

ASMAWARNI, 2015. *Financial Performance Analysis of the Regional Governments of Pangkajene and Kepulauan Regency*, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Supervisor I Abdul Rahman Rahim and Second Advisor Ismail Badollahi.

This study aims to analyze the government's financial performance of the Regional Government of Pangkajene and Kepulauan Regency. This type of research in this research is quantitative descriptive research. The data analysis method uses financial ratio analysis.

The results of this study show that the financial performance of the Pangkajene and Kepulauan Regency Governments is still not optimal. Even though the management of Regional Original Revenue has been effective and efficient, the level of regional independence is still very low. This can be proven from the amount of aid from the center and the province compared to the original income of the Pangkajene and Kepulauan Regency. In addition, the use of funds is still not balanced because most of the funds are used for operating expenditure rather than capital expenditure.

Keywords: Financial Performance and Financial Ratios.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
1. Laporan Keuangan Daerah	6
2. Pendapatan Asli Daerah	7
3. Kinerja	9
4. Rasio Keuangan	12
B. Penelitian Terdahulu	19

C.	Kerangka Pikir.....	26
D.	Hipotesis	27
BAB III	METODE PENELITIAN	28
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
D.	Metode Pengumpulan Data	30
E.	Metode Analisis Data	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
A.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	36
B.	Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajenedan Kepulauan.....	37
C.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	39
D.	Struktur Organisasi dan Job Description	40
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.	Hasil Penelitian	50
B.	Pembahasan	73
BAB VI	PENUTUP.....	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	DAFTAR LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	15
Tabel 2.2	Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah	16
Tabel 2.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	17
Tabel 2.4	Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	31
Tabel 3.2	Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah	32
Tabel 3.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	32
Tabel 5.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018	59
Tabel 5.2	Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018.....	63
Tabel 5.3	Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018	64
Tabel 5.4	Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018	65
Tabel 5.5	Perhitungan Rasio Aktivitas (Belanja Rutin) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018.....	66
Tabel 5.6	Perhitungan Rasio Aktivitas (Belanja Modal) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018.....	66
Tabel 5.7	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2017.....	68
Tabel 5.8	perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2017.....	68
Tabel 5.9	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten	

	Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017-2018.....	69
Tabel 5.10	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017-2018.....	69
Tabel 5.11	Rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2017.....	70



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dimana pemerintah, masyarakat dan pihak yang berkaitan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan maksimal dan juga memberikan lapangan kerja baru untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi secara maksimal di dalam wilayah tersebut. Akuntansi sektor publik sesuai dengan segala kekhasannya dan juga sistem dan lingkungannya tidak jauh dari bentuk organisasi itu sendiri (Halim, 2014).

Unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan keuangan daerah, walaupun ada variabel lain yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Variabel keuangan daerah penting karena berkaitan dengan fakta bahwa mobilisasi dengan sumber-sumber daya keuangan daerah dilihat sebagai yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Halim, 2014).

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah pada masa Pra Reformasi ditetapkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah merupakan hal yang melatarbelakangi kelahiran Undang-Undang tersebut dan juga mengatur pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Dalam Undang-Undang ini nuansa setralisasi lebih kuat jika dibandingkan dengan desentralisasi. Karena tidak ada kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan pada pemerintah daerah, dan juga ada kekuasaan sentralisasi, mengetahui bahwa tidak adanya pemisahan dengan yang berperan dalam eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif (Ayu, 2018).

Otonomi luas diberikan kepada daerah diharapkan untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan melalui pelayanan yang ditingkatkan, pemberdayaan dan adanya peran masyarakat. Selain dengan otonomi luas, daerah juga dapat meningkatkan daya saing dan harus memperhatikan prinsip keadilan, demokrasi, pemerataan, kekhususan dan keistimewaan, dan juga keanekaragaman serta potensi daerah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah maka dititik beratkan kepada daerah kabupaten atau kota disebabkan daerah kabupaten atau kota memiliki hubungan secara langsung dengan masyarakat. Untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menjalankan pemerintahan harus secara efektif dan efisien., dan juga harus mendorong peran penting masyarakat untuk pembangunan daerah dengan meningkatkan keadilan dan pemerataan seluruh potensi yang dimiliki harus dikembangkan oleh masing-masing daerah (Taras, 2017).

Pelaporan keuangan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyajian informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan serta mencerminkan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang telah

dipercayakan. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan.

Pembangunan daerah adalah semua pembangunannya dipersiapkan serta dilaksanakan oleh daerah dengan sumber daya yang dimanfaatkan yang ada pada daerah tersebut. Dengan pesatnya perkembangan pembangunan daerah sehingga alokasi dana pembangunan yang dibutuhkan cukup besar yang mengakibatkan belanja daerah mengalami peningkatan. Yang menentukan besarnya belanja daerah adalah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah (Yuliasti, 2018).

Sumber pendapatan asli daerah bersumber dari wilayah daerah tersebut dan diambil oleh daerah itu sendiri yang mengakibatkan pendapatan asli daerah ini merupakan wujud dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kepiawaian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kepiawaian pemerintah daerah untuk membayar biaya kegiatan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penentuan besarnya pendapatan dan pengeluaran, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan juga untuk mewujudkan pencapaian pembangunan (Suranta, 2017).

Sebuah Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi Karena Pemerintah Daerah menekankan hasil atas pendapatan Asli Daerah yang berasal dari berbagai berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak,

retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peneliti memilih periode tahun 2016-2018 untuk diteliti karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait dengan kinerja keuangan daerah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diangkat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Gambaran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Tiga Tahun Terakhir (2016-2018)”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam tiga tahun terakhir (2016-2018).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

1. Manfaat Teoritis

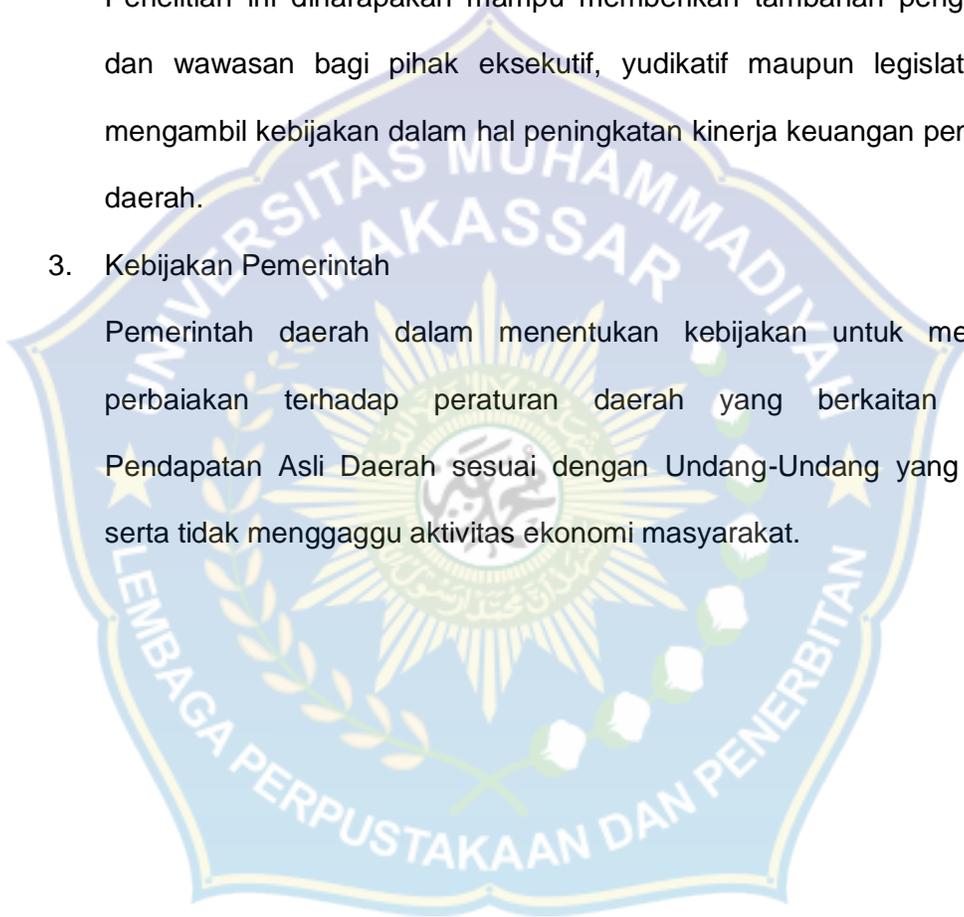
Dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan mampu memberikan informasi, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Kinerja Keuangan Daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatif untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan

Berdasarkan siklus akuntansi, laporan keuangan disusun berdasarkan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. laporan keuangan Pemda yaitu, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, sesuai dengan sudut pandang akuntansi dapat pula di susun laporan tambahan yaitu, laporan kinerja keuangan perubahan ekuitas dana atau dengan perubahan rekening Koran Pemda (Halim, 2007).

Sebagaimana halnya pada laporan laba rugi yang menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan dan penyusunan APBD kinerja Pemda juga merupakan laporan perhitungan APBD. Nota perhitungan APBD berisi ringkasan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan selama periode akuntansi pada tahun yang sedang berlangsung. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya (Taras, 2017).

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk

mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Dibidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD (Wenny, 2012).

Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi terkait dengan perubahan yang terjadi pada anggaran karena berbagai transaksi sebelumnya yang terjadi pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi terkait dengan kinerja untuk mendapatkan kas serta kemampuan penggunaan kas yang dibutuhkan oleh daerah pada suatu periode tertentu. Neraca merupakan laporan keuangan yang memberikat informasi terkait dengan posisi keuangan suatu daerah pada waktu tertentu (Halim, 2012).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

Pajak daerah Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Berwulo, 2017).

Retribusi daerah Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 tahun 2000. Retribusi yang dikenakan Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila apabila potensi penerimaannya kecil dan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut tanpa membayar. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelaku umum yang bersangkutan (Binanggul, 2016).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah bukanlah perkara mudah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta seringnya rotasi atau mutasi para

pejabat-pejabat pemerintah berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Fitra, 2014).

3. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Menurut Bastian (2008) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program kebijakan dan mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Jadi Kinerja merupakan gambaran suatu program kebijakan dan untuk tujuan terwujudnya sasaran, tujuan, visi dan misi. Prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu. Selain itu kinerja juga merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi dengan pihak lain agar dapat diketahui tingkat hasil yang dicapai oleh suatu instansi dikaitkan dengan visi misi yang diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki dampak positif dan negatif suatu kebijakan.

b. Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, kriteria dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya adalah merupakan pengukuran kinerja.

c. Tujuan Penilaian Kinerja

Pelaksanaan program prestasi bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan umpan balik untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan serta pencapaian tujuan di masa yang akan datang (Bastian, 2008).

Pengukuran prestasi berperan sebagai alat manajemen :

1. Menentukan pelaksanaan dan pengukuran yang di pergunakan untuk mewujudkan prestasi.
 2. Menentukan terwujudnya struktur prestasi yang telah disetujui.
 3. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dengan membandingkan pelaksanaan dan kerja.
 4. Membagikan penghargaan dan memberikan hukuman yang sesuai dengan prestasi pelaksanaan yang sudah diukur sesuai dengan sisitem pengukuran prestasi yang telah disetujui.
 5. Membuat alat komuikasi untuk komunikasi antara pimpinan dan bawahan dengan tujuan memperbaiki prestasi organisasi.
 6. Identifikasi apakah kepuasan telah dipenuhi.
 7. Berkontribusi dalam membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
 8. Menentukan keputusan yang diambil telah dilakukan secara objektif.
 9. Mengarahkan menuju peningkatan harus dilakukan.
 10. Memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang terjadi.
- d. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasa dilakukan dengan aspek-aspek berikut :

1. Aspek Finansial

Aspek finansial mencakup cash flow atau anggaran, pada aspek finansial ini sangat berguna yang diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan seperti aliran darah tubuh manusia.

2. Kepuasan Pelanggan

Pada masa kini peran dan posisi dijadikan sebagai bisnis untuk menempati posisi yang diinginkan Karena sangat diperlukan dalam penentuan strategi suatu perusahaan. Dengan ini manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan mengenai tingkatan kepuasan pelanggan.

3. Operasi dan Pasar Internal

Informasi operasi koperasi dan susunan dalam pasar internal dibutuhkan agar memastikan semua kegiatan organisasi telah disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

4. Kepuasan Pegawai

Pada suatu organisasi yang memiliki banyak inovasi, peran strategi pegawai sangat menentukan keberlangsungan organisasi tersebut.

5. Kepuasan komunikasi dan stakeholder

Pengukuran kinerja harus disusun dengan baik untuk mengkoordinasikan kekuasaan stakeholder.

6. Waktu

Untuk melakukan pengukuran harus memperoleh informasi terbaru agar manfaat yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja memberikan hasil yang maksimal.

4. Rasio Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat perkembangan suatu perusahaan guna meningkatkan kualitas dan kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, dimana dalam menganalisis laporan keuangan sebenarnya mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Tujuan analisis laporan keuangan penting bahwa setiap analisis laporan keuangan mencakup membaca dengan seksama catatan laporan keuangan yang berguna untuk memberikan analisis tambahan dalam laporan tahunan dan dengan sumber informasi lain yang terpisah dari laporan tahunan (Berwulo, 2017).

Menurut Halim (2007) penggunaan analisis rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu dikarenakan:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan incremental budget yaitu besarnya masing-masing

komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah pendapatan presentase tertentu.

3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun pada struktur APBD.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan sesuai dengan laporan yang ada. Untuk lembaga yang bersifat komersial, analisis rasio keuangan biasanya terdiri dari :

1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan keahlian suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya agar cepat selesai.
2. Rasio Leverage, merupakan rasio yang membandingkan dana yang telah dipinjam suatu perusahaan dari kreditur dengan dana yang telah disediakan oleh pemilik.
3. Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur keefektifan atau tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan sumber yang telah dimiliki oleh perusahaan.
4. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio sebagai alat ukur kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba,

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu:

1. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden ataupun memperoleh laba.
3. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. Karena hal itu secara teori tidak ada persetujuan sejarah mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Walaupun dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah yang jujur, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien. Akuntansi yang digunakan perusahaan dengan pengakuntansi APBD berbeda meskipun begitu analisis rasio perlu dilakukan dalam APBD. Pada APBD analisis rasio keuangan di laksanakan dengan melakukan perbandingan atas hasil yang telah diperoleh dari periode dengan periode selanjutnya karena hal tersebut maka bisa diketahui seperti apa yang terjadi (Efendi, 2011).

Ada beberapa rasio yang bisa ditingkatkan sesuai dengan data keuangan yang sumbernya dari APBD yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas (rasio keserasian), dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. kemandirian keuangan

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya dan bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menunjukkan dependensi daerah pada sumberdana eksternal. Jika semakin tinggi rasio kemandirian diartikan bahwa dependensi daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2007).

Rasio belanja transfer atau bagi hasil pendapatan terhadap total pendapatan.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})}$$

Tabel 2.1

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang disetujui jika dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi rill daerah. (Kaunang, 2016).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Kemampuan kinerja daerah dalam melaksanakan kewajiban di kategorikan efektif jika rasio yang telah diperoleh minimal 1% atau 100% tetapi apabila tinggi rasio efektifitas, menunjukkan kinerja daerah yang bertambah baik. Untuk mendapatkan ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut harus di persandingkan dengan rasio efisiensi yang telah di dapat oleh pemerintah.

Tabel 2.2

Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

b. Rasio Efisien

menunjukkan kesetaraan antara besarnya biaya yang telah di keluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengumpulan

pendapatan dikategorikan efisien apabila jika rasio yang telah diperoleh kurang dari 1% atau di bawah 100% .semakin kecil rasio efisiensi maka kemampuan pemerintahan semakin baik. Karena itu pemerintah daerah harus melakukan perhitungan dengan tepat seberapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang telah diterima agar dapat mengetahui apakah kegiatan pengumpulan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan sasaran penerimaan pendapatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, tetapi apabila jika keberhasilan itu kurang memiliki arti jika biaya yang di keluarkan untuk merealisasikan sasaran penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada pendapatan yang diterimanya. (Halim 2007).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.3

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presenrase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

3. Rasio Aktifitas (rasio keserasian)

Rasio ini menunjukkan seperti apa pemerintahan daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan dengan

maksimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Halim, 2007).

Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang asli berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. (Halim, 2007)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di peroleh dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Kaunang, 2016).

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Hasil analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efeasidalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur bagaimana aktivitas pemerintah daerah dalam membekanjakan pendapatan daerah.
4. Mengukur kontribusi sumber pendapatan untuk pembentukan pendapatan daerah.
5. Meninjau perkembangan dan pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu yang telah ditentukan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan keuangan daerah hasil dari penelitian itu dapat kita jadikan sebagai acuan untuk penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati dkk (2012). dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan meskipun secara bersamaan atau tersendiri terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial *berpengaruh* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasti Leki,dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, serta belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh David Evendy, (2011). dengan judul “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di Kabupaten Nganjuk”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Dokumentasi. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan paparan mengenai peningkatan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Nganjuk untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio

kemandirian masih berstatus rendah sekali, dan pada rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan juga negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fierginia Binanggal,dkk, (2016). dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado tahun 2004-2013”. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi, sedangkan pada pendapatan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Cheri Enjelita Kaunang, dkk (2016). dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota manado sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah terbukti dari hasil presentase rasio efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Puspita Ayu, (2018). dengan judul “Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda Karen variabelnya independennya lebih dari satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Welio Wonda, (2016). dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa

Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua”. Penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pengelolaan kinerja keuangan. metode analisis untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas baik karena setiap tahunnya pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny, (2012). dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Dari penelitian ini hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tetapi hanya secara Parsial dan pada kekayaan daerah tidak dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayani, (2016). dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Sukoharjo belum Maksimal. Meskipun pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi pada tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhimi Juwita, (2016). dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah ”.

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara serempak dan parsial <i>berpengaruh</i> terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2.	Yuliasti Leki, Amran T.Naukoko, Jacline I. Sumual (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa sesuai dengan hasil analisis regresi bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	David Efendi dan Sri Wuryanti (2011)	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda di	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian sangat rendah sekali serta rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang.

		Kabupaten Nganjuk		
4.	Fierginia Binanggul, Sutomo Wim Palar, dan Agnes L. CH. P. Lapian (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2004-2013	Metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Dan pada pendapatan pajak dan retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Cheris Enjelita Kaunang, Amran T Naukoko dan Albert T Londo (2016)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah : studi kasus pada Kota Manado tahun 2010-2014	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemerintahan di Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri, meskipun demikian pemerintah kita Manado masih terus berusaha untuk mandiri jika dilihat dari presentase kemandirian.
6.	Putri Puspita Ayu (2018)	Analisis PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat	Metode Deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Serta mengalami peningkatan pendapatan asli daerah bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.
7.	Welio Wonda (2016)	Analisis Kinerja Keuangan	Metode Kuantitatif	Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan

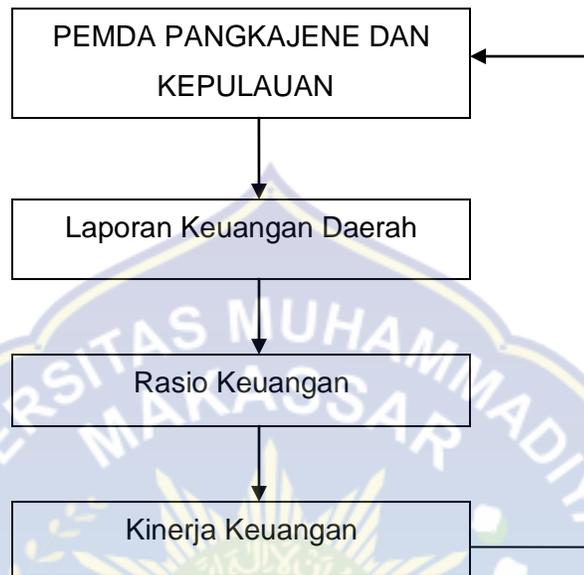
		Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua		bahwa rasio efektivitas baik.
8.	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
9.	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013	Metode Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sukoharjo masih belum maksimal.
10.	Rakhimi Juwita (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2012-2015	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian secara parsial retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengelolaan kekayaan daerah pada pendapatan asli daerah secara simultan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

C. Kerangka Pikir

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya. Ini dikarenakan keuangan daerah menjadi mobilisator terhadap sumber-sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan tugas pembangunan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Alur pemikiran tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) tentang Kinerja Keuangan Daerah menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan. Untuk kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya di ajukan hipotesis pengaruh sebagai berikut:

“Diduga bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) baik.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang menggunakan penelitian dengan angka. Data kuantitatif adalah data angka yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkaitan dalam masalah yang ada dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu selama 2 bulan dari bulan mei sampai bulan juli.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Maka perlu memahami berbagai unsur yang mendasari dari suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi beberapa indikator berupa rasio, adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menanggung sendiri kegiatan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Dasar perhitungannya yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Tingkat efektivitas pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

b. Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi kinerja pemerintah untuk pengumpulan pendapatan dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja pembangunan dan belanja rutin secara maksimal. Untuk mengetahui rasio keserasian itu yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diperoleh dari 1 periode ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan dan pengeluaran. Diformulasikan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumen yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

2. Tinjauan Kepustakaan (*library research*)

Adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, dan mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah yang di dibahas agar dapat mendapatkan landasan teori mengenai hal yang ingin dibahas.

3. Mengakses website yang mempunyai informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Yang menetapkan teori perhitungan rasio keuangan untuk penilaian kinerja keuangan, dengan memperkirakan rasio keuangan dari realisasi anggaran dalam APBD dan juga Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2016-2018. Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dengan Menggunakan rasio-rasio berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menanggung sendiri kegiatan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Dasar perhitungannya yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel 3.1

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%

Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

c. Rasio Efektifitas

Tingkat efektivitas pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Tabel 3.2

Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

d. Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi kinerja pemerintah untuk pengumpulan pendapatan dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3.3

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas

Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja pembangunan dan belanja rutin secara maksimal. Untuk mengetahui rasio keserasian itu yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

Menurut Halim (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah diperoleh dari 1 periode ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan dan pengeluaran. Diformulasikan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. *Pangka* berarti cabang, dan *Je'ne* berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Menurut sejumlah buku sejarah, terutama buku Bale Lata, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia Ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km², tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 Km² dengan luas wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 Km². Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur, dan 040. 40' – 080. 00' Lintang Selatan.

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Batas

administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Madura, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpenduduk sebanyak \pm 300 ribu jiwa. Pada hasil Sensus tahun 2010 menyatakan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekitar 305.737 Jiwa yang terdiri atas 147.229 Laki-Laki, dan 158.508 Jiwa Perempuan.

B. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan terbentuk pada tahun 1974 berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri No.7/12.14-101 tentang struktur tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan BKDH Tk.II Pangkejene dan Kepulauan tahun 1991 dan surat keputusan Menteri dalam Negeri No.29/V/1991 No.23 Tahun 1983 s/d Surat Keputusan BKDH Tk. II Pangkajene dan Kepulauan No.20/V/1990 Tentang susunan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No.16 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas-Dinas dalam lingkup

Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 219 tahun 2001 dan yang terakhir No.12 Uraian tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami perubahan Menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditidaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Nama – nama Pejabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 1974 sampai sekarang yaitu:

- a) Sabani AS, BA pada tahun 1974 s/d 1976
- b) M. Jabbari pada tahun 1976 s/d 1979
- c) H. M. Zaenal pada tahun 1979 s/d 1985
- d) Drs. Soalihu Karim pada tahun 1985 s/d 1989
- e) H. M. Yunus Kadir, BA pada tahun 1989 s/d 1990
- f) H. Anwar Andi Hilal, BA pada tahun 1990 s/d 1995

- g) Drs. H. Abbas Marsuki pada tahun 1996 s/d 1999
- h) Drs. ABD. Rahim Nur pada tahun 1999 s/d 2000
- i) Drs. ABD Karim pada tahun 2000 s/d 2005
- j) Drs. H. Syafruddin Muammar, MM pada tahun 2005 s/d 2010
- k) Hj. Jumliati, M.Si (DPKD) pada tahun 2010 s/d 2012
- l) Drs. A. Yathrib Pare pada tahun 2012 sampai saekarang

C. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

a. Visi

Visi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yaitu, *“mewujudkan visi kabupaten pangkajene dan kepulauan dengan meningkatkan kemandirian pemerintah dibidang keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang aparatur profesional dan bertanggungjawab”*.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merumuskan misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
- 2) Peninkatan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan pelaksanaan sertan pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

3) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

D. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu alat yang dipakai dalam mencapai tujuan, dimana struktur organisasi diharapkan dapat membawa persatuan dan dinamika, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



b. Job Description

1. Kepala Badan
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya.
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 - e. Koordinasi bidang pendapatan daerah.
 - f. Pengelolaan unit pelaksana teknis badan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
 - a. Menyusun dan merencanakan program kerja sub bagian umum kepegawaian peningkatan pendapatan.
 - b. Menyusun kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan umum, peningkatan pendapatan daerah, pelaporan, perundang-undangan dan urusan rumah tangga
 - c. Pelaksanaan pengoahan ketatausahaan badan.

- d. Koordinasi dan mengadakan kerjasama dalam lingkup badan pengelola penadapatan maupun unit kerja lainnya.
- e. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- f. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB), penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB, pajak PBB sarana administrasi PBB.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, member tugas, member petunjuk, mengatur, memeriksa/mengecek, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, peningkatan pendapatan.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, member tugas, member petunjuk, mengatur, membimbing dan melaporkan tugas sesuai dengan Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, member petunjuk, member tugas, mengatur, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan keperbendaharaan dalam rangka pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Pendapatan.
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - b. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah.
 - c. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah.
 - d. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
 - e. Pengolahan data potensi penerimaan pendapatan daerah.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, Pelaksanaan Perencanaan Pendapatan terhadap obyek/subyek pajak dan retribusi, penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah, pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah, penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan dan analisis kebijakan pendapatan.

2. Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengembangan terhadap obyek/subyek pajak/retribusi Daerah serta pendapatan lainnya, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah, inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah, penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah.
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap obyek/subyek pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, pengendalian pemungutan pendapatan daerah, pengendalian potensi pajak dan retribusi daerah, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah, melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang pajak dan retribusi daerah.
4. Bidang Pendataan
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang urusan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- b. Penyusunan perencanaan umum dibidang pendaftaran dan pendataan, pemeriksaan, pengolahan data dan informasi anggaran penanganan urusan pemerintah daerah.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pendataan, pengawasan dan pemeriksaan.
- d. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan pendataan.
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup bidang.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pendapatan terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pendaftaran dan pendataan obyek/subyek pajak dan retribusi serta, member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan.
2. Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksana pemeriksaan terhadap obyek/subyek pajak/retribusi daerah serta pendapatan lainnya,

member petunjuk, member tugas, membimbing, pemeriksaan/mengecek dan membuat laporan tugas Sub Bidang Pemeriksaan.

3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan, menyiapkan data dan dokumentasi serta melaksanakan dokumentasi obyek/subyek pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi.

5. Bidang Penetapan

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah.
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah sumber Pendapatan Daerah lainnya.
- c. Penyiapan bahan teknis pelaksanaan analisis terhadap data obyek pajak dan retribusi daerah untuk menghitung besarnya jumlah pajak/retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan teknis kegiatan keberatan dan angsuran.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan dibidang penetapan.

Bidang Penetapan terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisa dan Perhitungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan penetapan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, melakukan analisa perhitungan pajak/retribusi daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
2. Sub Bidang Penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan, memberi petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), meneliti dan menerbitkan surat ketetapan besaran pajak/retribusi daerah yang terutang serta mendistribusikan dan membuat laporan.
3. Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur pelayanan keberatan dan pertimbangan terhadap wajib pajak/wajib retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa, mengecek dan membuat laporan Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan.
6. Bidang Penagihan dan Pembukuan

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Pelaksanaan pembinaan koordinasi pengelolaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dan pengelolaan penerimaan bagi hasil pendapatan dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan dan Pemungutan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan bidang penagihan dan pemungutan meliputi penagihan terdapat wajib pajak/retribusi daerah dan pelaksanaan dokumentasi jumlah atau besarnya tunggakan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional mengatur pada bidang penerimaan, pencatatan, dokumentasi, dan pembukuan serta pelaporan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lainnya melalui Simda Pendapatan.
3. Sub Bidang Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mempunyai tugas melaksanakan dan merencanakan kegiatan operasional mengatur dan mengendalikan pada bidang penerimaan terhadap

pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta penyusunan kebijakan teknis, dokumentasi dan pengordinasian pengelolaan pajak/retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sistem Akuntansi

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;
 - 1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165).
- 14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

c. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah :

- 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- 2) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 3) Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 4) SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
- 6) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 7) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 8) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
- 9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 10) Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 11) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 12) Basis Kas menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
- 13) Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya criteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagaimana termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- 14) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- 15) Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 16) Lapran Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- 17) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 18) Neraca adalah yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 19) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 20) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 21) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 22) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

- 23) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 24) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 25) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaan anggaran/penggunaan barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 26) Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 27) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- 28) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 29) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 30) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 31) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 32) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 33) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 34) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- 35) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 36) Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
- 37) Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis Akrual. Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD dan BAS. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
- 2) Kebijakan Akuntansi Akun.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. dan Kebijakan Akuntansi Akun Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengatur definisi, pengakuan pengukuran, penilaian, dan/atau atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 5.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018

Nomor	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN	1.400.921.128.153	1.359.084.464.942	1.369.995.735.537
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	156.385.492.233	162.621.399.914	174.187.244.559
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.565.057.992	72.915.174.176	75.013.342.158
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.441.430.495	6.722.211.814	7.552.825.277
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang			

1.1.4	Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.916.672.337 25.462.331.490	11.264.745.448 71.719.268.476	10.630.772.849 80.990.304.275
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.210.505.795.549	1.121.848.103.366	1.138.626.599.093
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.114.262.819.971	1.010.789.986.729	1.032.137.488.223
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	23.187.965.472	27.438.649.541	20.095.060.874
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	7.766.322.878	3.814.290.599	4.778.474.359
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	701.629.223.000	689.947.090.000	752.773.975.000
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	381.679.308.621	289.589.956.589	254.489.977.990
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	49.093.759.000	63.085.494.357	64.274.262.000
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	49.093.759.000	63.085.494.357	64.274.262.000
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	47.149.216.578	47.972.622.280	42.214.848.870
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.149.216.578	47.972.622.280	42.214.848.870
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.029.840.371	74.614.961.662	57.181.891.885
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.442.241.309	18.092.250.798	45.778.120.000
1.3.2	Pendapatan Lainnya	14.587.599.062	56.522.710.864	11.403.771.885
2	BELANJA	1.401.641.071.193	1.338.815.258.407	1.393.344.749.057
2.1	BELANJA OPERASI	910.491.967.172	985.933.813.617	1.069.642.976.908
2.1.1	Belanja Pegawai	607.269.772.252	540.002.466.109	549.036.637.086
2.1.2	Belanja Barang	209.932.761.163	279.717.779.048	331.324.166.480
2.1.3	Belanja Bunga	1.903,212		
2.1.4	Belanja Hibah	30.231.455.010	35.730.396.960	44.352.841.742
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.858.700.000	1.874.750.000	3.755.700.000
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	61.197.375.535	128.608.421.500	141.173.631.600

2.2	BELANJA MODAL	490.626.623.021	352.881.444.790	322.738.156.149
2.2.1	Belanja Tanah	9.364.952.200	1.523.565.000	10.120.150.050
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	52.025.918.342	73.366.980.090	48.559.346.603
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	125.344.278.391	86.178.259.015	94.249.846.602
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	301.215.211.248	177.770.562.546	159.522.383.345
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.676.262.840	14.042.078.139	10.286.429.549
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	522.481.000,00	0	963.616.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	522.481.000,00	0	963.616.000
SURPLUS/(DEFISIT)		(719.943.040)	20.269.206.534	(23.349.013.519)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	67.899.210.834	49.317.860.800	65.725.105.977
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	67.889.210.834	49.317.860.800	65.725.105.977
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
3.2	PENGELUARAN DAERAH	18.461.256.004	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.429.986.759	5.000.000.000	5.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	31.269.245		
PEMBIAYAAN NETTO		49.437.954.830	44.317.860.800	60.725.105.977
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		48.718.011.790	64.587.067.335	37.376.092.458

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam pembahasan berikut:

a. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 5.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)	Presentase Kemandirian (%)
2016	156.385.492.233	1.210.505.795.549	12,91 %
2017	162.621.399.914	1.121.848.103.366	14,48 %
2018	174.187.244.559	1.138.626.599.093	15,29 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tingkat kemandiriannya mengalami peningkatan Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rasio kemandirian dari tahun 2016 yaitu 12,91%, 2017 yaitu 14,48 % dan 2018 yaitu 15,29 % akan tetapi peningkatan ini tidak menunjukkan kemandirian Pemerintah Daerah karena jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2016-2018 tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai yang dicapai minimal 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efektifitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Rasio Efektivitas

Tabel 5.3

Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2016	162.043.747.290	156.385.492.233	96,50 %
2017	219.077.626.143	162.621.399.914	74,23 %
2018	175.806.897.280	174.187.244.559	99,07 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2016 dan 2018 dikategorikan efektif dalam merealisasikan pendapatannya walaupun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 74,23. Hal ini dipengaruhi dari beberapa target sumber PAD hampir tercapai terutama pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal utama penyebab tidak efektifnya PAD pada tahun 2017 dikarenakan realisasi pendapatan retribusi daerah jauh dari target sehingga mengurangi realisasi PAD.

b. Rasio Efisiensi

Tabel 5.4

Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2016	3.936.147.048	156.385.492.233	2,51 %
2017	3.279.076.919	162.621.399.914	2,01 %
2018	3.175.290.986	174.187.244.559	1,82 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2016 yaitu 2,51 % , tahun 2017 2,01 % dan pada tahun 2018 1,82 % . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mengelola Pendapatan asli daerahnya dikategorikan sangat efisien karena hasil rasio efisiensi kurang dari 60 % semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, ini berarti pemerintah daerah telah menghitung dengan

cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima setiap tahunnya.

c. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomimasyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 5.5

Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018 (Belanja Rutin)

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2016	910.491.967.172	1.401.118.590.193	64,98 %
2017	985.933.813.617	1.338.815.258.407	72,65 %
2018	1.069.642.976.908	1.392.381.133.057	76,82 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

Tabel 5.6

Perhitungan Aktivitas Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018 (Belanja Modal)

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	490.626.623.021	1.401.118.590.193	35,01 %

2017	352.881.444.790	1.338.815.258.407	26,35 %
2018	322.738.156.149	1.392.381.133.057	23,17 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

Dari tabel diatas rasio aktivitas terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 rasio belanja rutin/operasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/operasi dan belanja modal belum optimal karena sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin/operasi terutama pada belanja pegawai sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Tabel 5.7

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2017

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2016	156.385.492.233	1.400.921.128.153	-	-
2017	162.621.399.914	1.359.084.464.942	3,98 %	-2,98 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2017

Tabel 5.8

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2017

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2016	910.491.967.172	490.626.623.021	-	-
2017	985.933.813.617	352.881.444.790	8,28 %	-28,07 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,98 % hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dinilai baik dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu -2,98 dan Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kurang baik hal ini dikarenakan beberapa komponen dalam pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan untuk belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 8,28 % namun pada belanja

modal mengalami pertumbuhan yang negatif dikarenakan pada tahun 2017 belanja modal mengalami penurunan terutama pada belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, serta belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan.

Tabel 5.9

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2017	162.621.399.914	1.359.084.464.942	-	-
2018	174.187.244.559	1.369.995.735.537	7,11 %	0,80 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2017-2018

Tabel 5.10

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2017	985.933.813.617	352.881.444.790	-	-
2018	1.069.642.976.908	322.738.156.149	8,49 %	-8,54 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2017-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif dimana rasio pertumbuhan PAD sebesar 7,11 % dan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 0.80 %. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2017-2018 dinilai baik. Sedangkan untuk belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 8,49 % namun pada belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu -8,54 dikarenakan pada tahun 2018 belanja modal mengalami penurunan terutama pada belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap mengalami penurunan.

4. Rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tabel 5.11

Rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018	Keterangan
1.	Rasio Kemandirian	12,91 %	14,49 %	15,29 %	Kemandirian Daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masih sangat rendah.
2.	Rasio Efektivitas	96,50 %	74,23 %	99,07 %	Pemerintah Daerah dikategorikan efektif dalam merealisasikan pendapatan daerahnya pada tahun 2016 dan 2018 sedangkan pada tahun 2017 kurang efektif dalam merealisasikan pendapatannya.
3.	Rasio Efisiensi	2,51 %	2,01 %	1,82 %	Pemerintah Daerah sangat efisien dalam memungut

					sumber pendaptan daerah. Semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
4.	Rasio Aktivitas				
	a. Rasio Belanja Operasi	64,98 %	72,65 %	76,82 %	Sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kebutuhan operasional sehingga belanja operasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018
	b. Rasio Belanja Modal	35,01 %	26,35 %	23,17 %	Hanya sebagian kecil dana yang dimiliki pemerintah digunakan untuk pembangunan dan itupun rasionya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
5.	Rasio Pertumbuhan				Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah tahun 2016-2018 pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah di nilai baik. Akan tetapi pada pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan
	a. PAD	-	3,89 %	7,11 %	
	b. Pendapatan	-	-2,98 %	0,80 %	
	c. Belanja Operasi	-	8,28 %	8,49 %	
	d. Belanja Modal	-	-28,07 %	-8,54 %	

					yang negatif yang berarti pertumbuhannya kurang baik.
--	--	--	--	--	---

B. Pembahasan

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan dari hasil analisis rasio kemandirian, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi), dengan melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah. Menurut Yulianti (2008), salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilihat dari rasio kemandirian tahun

2016-2018 bertentangan dengan teori menurut Yulianti. Dimana rata-rata rasio kemandirian daerah yaitu hanya mencapai 0-25 % dari kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah yang dikategorikan rendah sekali disebabkan tingginya ketergantungan terhadap pihak pusat.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dipengaruhi dari beberapa target sumber PAD hampir tercapai terutama pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2012) kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan dikategorikan efektif apabila 1 atau 100%. Namun apabila semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2016-2018 sudah sejalan dengan teori menurut Halim karena rasio efektivitas telah mencapai 90-100% yang dikategorikan efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat kinerja pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 dapat dikatakan sangat efisien karena mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan. Menurut

Halim (2012) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio efiseinsi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Kinerja pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilihat dari rasio efisiensi tahun 2016-2018 sudah sejalan dengan teori menurut Halim karena rasio efisiensi pada periode tersebut mencapai dibawah 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas, dapat dilihat sebagian dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun. Menurut Halim (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/operasi berarti presentase belanja pembangunan/modal yang digunakan yang digunakan untuk menyediakan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pendapatan dan

pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan positif hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di nilai baik sedangkan pada pertumbuhan belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif yang menunjukkan penurunan kinerja dalam pembangunan. Menurut Halim (2012) kinerja pendapatan dinilai baik apabila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika pertumbuhan negatif, hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kemandirian pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah karena dari tahun ke tahun peningkatannya hanya sedikit yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,91 %, kemudian tahun 2017 sebesar 14,49 % dan pada tahun 2018 sebesar 15,29 %.
- b. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2016 memiliki rasio efektivitas 96,50 % dan rasio efisiensi 2,51 % kemudian pada tahun 2017 memiliki rasio efektivitas sebesar 74,23 % dan rasio efisiensi 2,01 % dan pada tahun 2018 memiliki rasio efektivitas 99,07 % dan rasio efisiensi sebesar 1,82%.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasi, yakni 64,98 % (2016), 72,65 % (2017) dan 76,82 % (2018). Di lain pihak rasio belanja modal

terhadap APBD juga masih rendah yaitu 35,0 % (2016), 26,35 % (2017) dan 23,17 %.

- d. Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber daya ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 3, No.1 .
- Bastian, I. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Berwulo, L. M. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.17. No.01 .
- Binanggul.F., P. d. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2004-2013. Jurnal Berkala Ilmiah, Vol.3 No.02 .
- Efendi, D. d. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otda di Kabupaten Nganjuk. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan .
- Fitra, H. 2014. Analisis Pendapatan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekaran. Jurnal WRA. Vol.2. No. 1 .
- Halim Dan Kusufi, M. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. D. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati E, D. d. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh . Jurnal Akuntansi. Vol.1, No 2 .
- Juwita, R. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2012-2015. Semnas Fekon .
- Kaunang, C. E. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014) . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.16, No 02.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA. Vol. 1 No 1 .
- Suranta, S. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan . Jurnal Akuntansi. Vol.5. No.2 .
- Taras, T. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali . E-Jurnal Manajemen Unud. Vol.6 No.5 .
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol.2 No.1 .
- Wonda, W. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua . Jurnal EMBA. Vol. 4 No.3 .
- Yuliasti L, A. T. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.18, No.05 .

RIWAYAT HIDUP



AMAWARNI Lahir di Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Oktober 1997. Anak ke tiga dari empat bersaudara merupakan buah hati pasangan Ayahanda Anwar dan Ibunda Nurbaeti.

Penulis memulai pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SDN 07 Kayumate) pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 3 Labakkang) dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Labakkang) dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Makassar) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Program Studi S1.